



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 12 April 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – 16.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pelaksanaan Program dan anggaran Tahun 2023; 2. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 44 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. (Kepala BNPB); 3. Jajaran BNPB.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dengan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, M.P.A., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas **“Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2023 dan Isu-isu aktual lainnya”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memahami penambahan anggaran BNPB Tahun 2023 sebesar Rp.1.225.500.000.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) untuk bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa di Kabupaten Cianjur dimana pagu awal sebelumnya sebesar Rp1.036.186.769.000,- (*Satu Triliun Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), sehingga total anggaran BNPB Tahun 2023 sebesar Rp.2.261.686.769.000,- (*Dua Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman bersama eselon I BNPB mengenai penambahan anggaran tersebut pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran BNPB tahun 2023 sampai 10 April 2023 yang telah mencapai 63,17 % atau sebesar Rp. 1.409.622.741.120,-(*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI mendukung program bantuan stimulan gagal panen akibat banjir bagi 57.053 petani yang diamanahkan oleh Presiden kepada BNPB dengan mekanisme DSP agar dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam setiap agenda kegiatan yang dilakukan BNPB di daerah pemilihan anggota Komisi VIII DPR RI.
 - b. Dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan BNPB agar mengakomodir berbagai kepentingan di daerah sehingga output dan outcome kegiatan bisa berjalan selaras antara pusat dan daerah.
 - c. Perlu mengevaluasi kembali penetapan status darurat bencana di daerah tidak semata-mata berdasarkan penetapan dari kepala daerah namun ada standar protokol tertentu yang menjadi acuan BNPB.
 - d. Agar meningkatkan sosialisasi literasi kebencanaan di daerah rawan bencana.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**



H. MARWAN DASOPANG, M.Si